

## Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pagu Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kota / Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Periode 2020 - 2021

Rita Febrianti<sup>1</sup>, Rita Kusumadewi<sup>2</sup>, Nur Eka Setiowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 19 April 2024

Revisi Akhir: 14 Mei 2023

Diterbitkan Online: 7 Juni 2024

### KATA KUNCI

Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### KORESPONDENSI

E-mail: ritafeb24@gmail.com

### ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat merupakan salah satu tujuan utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu pagu anggaran dan laporan realisasi anggaran APBD yang diperoleh dari website resmi DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Metode analisis data yang digunakan adalah metode rasio perbandingan efektivitas dan metode rasio perbandingan efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai rata – rata efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 106% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan nilai rata – rata efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 99% dengan kriteria kurang efisien.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa keterampilan pasar modal pada Indonesia yang menuntut Indonesia untuk lebih mandiri dan mampu bersaing dengan negara lain khususnya dalam bidang perekonomian (Mustari & Rahman, 2014). Oleh karena itu, menjadi tugas yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya, sehingga dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Kesejahteraan sangat penting bagi masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat merupakan salah satu tujuan utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma kesejahteraan ekonomi warga negara harus benar-benar diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sukmana et al., 2015). Upaya

untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi selama ini hanya dapat dibenarkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat (pembangunan ekonomi) atau melalui program pengentasan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan (Sahban & Se, 2018).

Kemakmuran perekonomian sulit dicapai jika keadaan perekonomian tidak membaik dan permasalahan ekonomi dianggap sebagai sektor kecil dalam sektor besar masyarakat (Nailufarh, 2010). Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyusun anggaran sehingga dapat mengembangkan potensi daerahnya. Potensi daerah dapat berupa sektor pertanian dan perkebunan, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor air bersih, sektor kelautan dan perikanan, sektor pembangkit tenaga listrik,

sektor kesehatan dan lain-lain (Saputra, 2018). Potensi yang dikembangkan dengan baik dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam penyusunan rancangan APBD, kepala daerah menetapkan prioritas dan pagu anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Berdasarkan prioritas dan pagu anggaran tersebut, kepala satuan kerja daerah menyusun rencana kerja yang sesuai berdasarkan potensi pekerjaan yang akan dilakukan (Wance, 2019). Pengembangan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan makroekonomi dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan menyiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik (Yuliasati, 2017)

## KAJIAN TEORI

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam waktu satu tahun (Savitri et al., 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diintegrasikan ke dalam perhitungan keuangan dan diselesaikan oleh Kepala Daerah (Hayati, 2022).

Menurut DJPK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (Faddila et al., 2022).

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah (Purpitasari & Kurnia, 2015). Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (DJPK, 2017).

### Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti yang dikemukakan oleh Anthony dalam bukunya Sistem informasi yang

dikutip dari (TRIA, 2018) mendefinisikan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapainya.

Cara pengukuran terhadap efektivitas menurut Steeres dalam (Kharisma & Yuniningsih, 2017) sebagai berikut : 1) Pencapaian tujuan 2) Adaptasi 3) Integrasi. Aspek kriteria efektivitas menurut Gibson dalam (Aprilliani & Maesaroh, 2021) yaitu : 1) Produksi 2) Efisiensi 3) Kepuasan 4) Adaptasi 5) Pengembangan Organisasi. Pengukuran efektivitas organisasi menurut Etziomi dalam (Murti, 2017) : 1) Adaptasi 2) Integrasi 3) Motivasi 4) Produksi.

### Efisiensi

Efisiensi menurut (Syam, 2020) yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan dalam proses, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. Efisiensi menurut Susilo yang dikutip dari (Syam, 2020) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

### Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya (2015) dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang – undangan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rudianto yang dikutip dari (Firdausi, 2022) juga mengungkapkan Laporan realisasi anggaran adalah Rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota / Kabupaten yang termasuk kedalam Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jumlah keseluruhan populasi yang terdaftar di DJPK sebanyak 27 Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten.

Dalam penelitian ini populasi dan sampel jenuh yang diambil adalah seluruh Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang jumlah populasi nya sebanyak 27 Pemerintah Daerah yang akan dijadikan sampel jenuh dalam penelitian ini.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian, dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari

mana (Ulfa, 2021). Berikut adalah tabel yang berisikan ringkasan dari definisi operasional variabel:

1) Efektivitas Pagu ( $X_1$ )

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Asmaniar, 2023). Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efektivitas anggaran jika rasio efektivitasnya lebih dari 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2) Efisiensi Pagu ( $X_2$ )

Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu (Catio, 2020). Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 60%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran (Yuliyanto et al., 2022).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3) Realisasi Anggaran APBD (Y)

Menurut (Basri, 2013) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan. Indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah (Sinambela & Ana, 2016).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Rasio Efektivitas

**Tabel 1**  
**Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat**  
**Periode 2020 – 2021**

Pemerintah Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio Efektivitas	Kriteria
<b>TAHUN 2020</b>				
Kab. Bandung Barat	6.103.950.000.000	5.294.250.000.000	87%	Kurang Efektif
Kab. Bandung	9.420.770.000.000	11.320.420.000.000	120%	Sangat Efektif
Kab. Bekasi	12.296.040.000.000	12.367.830.000.000	101%	Sangat Efektif
Kab. Bogor	14.468.440.000.000	16.479.660.000.000	114%	Sangat Efektif
Kab. Ciamis	4.942.940.000.000	5.369.310.000.000	109%	Sangat Efektif
Kab. Cianjur	7.363.670.000.000	7.935.380.000.000	108%	Sangat Efektif
Kab. Cirebon	7.205.870.000.000	7.830.230.000.000	109%	Sangat Efektif
Kab. Garut	9.114.050.000.000	9.311.390.000.000	102%	Sangat Efektif
Kab. Indramayu	6.878.140.000.000	6.603.240.000.000	96%	Cukup Efektif
Kab. Karawang	9.152.560.000.000	8.936.540.000.000	98%	Cukup Efektif
Kab. Kuningan	5.390.500.000.000	5.604.600.000.000	104%	Sangat Efektif
Kab. Majalengka	6.833.430.000.000	6.580.600.000.000	96%	Cukup Efektif
Kab. Pangandaran	2.712.870.000.000	3.160.290.000.000	116%	Sangat Efektif
Kab. Purwakarta	4.700.860.000.000	4.429.130.000.000	94%	Cukup Efektif
Kab. Subang	6.412.710.000.000	5.989.410.000.000	93%	Cukup Efektif
Kab. Sukabumi	8.204.700.000.000	8.042.580.000.000	98%	Cukup Efektif
Kab. Sumedang	5.628.590.000.000	5.890.130.000.000	105%	Sangat Efektif

Kab. Tasikmalaya	6.458.460.000.000	7.398.600.000.000	115%	Sangat Efektif
Kota Bandung	14.815.540.000.000	11.529.530.000.000	78%	Kurang Efektif
Kota Banjar	1.646.060.000.000	1.585.110.000.000	96%	Cukup Efektif
Kota Bekasi	11.628.880.000.000	10.656.180.000.000	92%	Cukup Efektif
Kota Bogor	5.038.830.000.000	5.110.950.000.000	101%	Sangat Efektif
Kota Cimahi	3.002.240.000.000	3.011.500.000.000	100%	Sangat Efektif
Kota Cirebon	3.583.610.000.000	3.266.420.000.000	91%	Cukup Efektif
Kota Depok	6.707.730.000.000	6.716.110.000.000	100%	Sangat Efektif
Kota Sukabumi	2.646.830.000.000	2.475.340.000.000	94%	Cukup Efektif
Kota Tasikmalaya	3.373.380.000.000	3.535.870.000.000	105%	Sangat Efektif

#### TAHUN 2021

Kab. Bandung Barat	5.970.410.000.000	5.806.790.000.000	97%	Cukup Efektif
Kab. Bandung	8.785.330.000.000	11.997.500.000.000	137%	Sangat Efektif
Kab. Bekasi	12.472.980.000.000	13.264.560.000.000	106%	Sangat Efektif
Kab. Bogor	13.519.360.000.000	18.249.240.000.000	135%	Sangat Efektif
Kab. Ciamis	4.722.020.000.000	5.424.930.000.000	115%	Sangat Efektif
Kab. Cianjur	5.988.520.000.000	8.278.360.000.000	138%	Sangat Efektif
Kab. Cirebon	6.945.660.000.000	8.276.710.000.000	119%	Sangat Efektif
Kab. Garut	8.752.090.000.000	9.598.280.000.000	110%	Sangat Efektif
Kab. Indramayu	6.879.000.000.000	6.860.390.000.000	100%	Sangat Efektif
Kab. Karawang	9.034.230.000.000	10.248.930.000.000	113%	Sangat Efektif
Kab. Kuningan	5.103.400.000.000	5.586.030.000.000	109%	Sangat Efektif
Kab. Majalengka	7.089.850.000.000	6.250.880.000.000	88%	Kurang Efektif
Kab. Pangandaran	2.932.680.000.000	2.687.010.000.000	92%	Cukup Efektif
Kab. Purwakarta	4.724.560.000.000	4.852.380.000.000	103%	Sangat Efektif
Kab. Subang	6.073.410.000.000	6.379.080.000.000	105%	Sangat Efektif
Kab. Sukabumi	7.977.700.000.000	8.421.630.000.000	106%	Sangat Efektif
Kab. Sumedang	4.337.380.000.000	5.780.330.000.000	133%	Sangat Efektif
Kab. Tasikmalaya	6.372.270.000.000	6.483.140.000.000	102%	Sangat Efektif
Kota Bandung	13.136.370.000.000	12.113.330.000.000	92%	Cukup Efektif
Kota Banjar	1.510.330.000.000	1.558.420.000.000	103%	Sangat Efektif
Kota Bekasi	12.023.000.000.000	12.299.230.000.000	102%	Sangat Efektif
Kota Bogor	4.795.170.000.000	5.647.510.000.000	118%	Sangat Efektif
Kota Cimahi	2.817.960.000.000	3.310.310.000.000	117%	Sangat Efektif
Kota Cirebon	2.884.570.000.000	2.739.040.000.000	95%	Cukup Efektif
Kota Depok	5.963.400.000.000	6.792.040.000.000	114%	Sangat Efektif
Kota Sukabumi	2.455.560.000.000	2.565.990.000.000	104%	Sangat Efektif
Kota Tasikmalaya	3.325.820.000.000	4.094.760.000.000	123%	Sangat Efektif

#### Rata - Rata

106%

Sangat Efektif

Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2020 kategori kurang efektif memiliki persentase sebesar 7,4% , kategori cukup efektif memiliki persentase sebesar 37%, dan kategori sangat efektif memiliki persentase sebesar 55.56%. Sedangkan pada tahun

2021 kategori kurang efektif memiliki persentase sebesar 3,7% , kategori cukup efektif memiliki

persentase sebesar 14,82%, dan kategori sangat efektif memiliki persentase sebesar 81,48%. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Efektivitas PAD disimpulkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Jawa Barat telah efektif dan sangat efektif dalam merealisasikan target PAD. Pada tahun 2020 terdapat 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten-Kota yang realisasi PAD-nya melebihi target PAD sedangkan pada tahun 2021 terdapat 21 (dua puluh

satu) Pemerintah Kabupaten-Kota yang realisasi PAD-nya melebihi target PAD.

### Analisis Rasio Efisiensi

**Tabel 2**  
**Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat**  
**Periode 2020 – 2021**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
<b>TAHUN 2020</b>				
Kab. Bandung Barat	2.530.170.000.000	2.678.140.000.000	106%	Tidak Efisien
Kab. Bandung	5.345.990.000.000	5.467.220.000.000	102%	Tidak Efisien
Kab. Bekasi	5.558.320.000.000	5.479.340.000.000	99%	Kurang Efisien
Kab. Bogor	7.687.180.000.000	8.405.490.000.000	109%	Tidak Efisien
Kab. Ciamis	2.620.230.000.000	2.666.320.000.000	102%	Tidak Efisien
Kab. Cianjur	3.840.500.000.000	3.907.920.000.000	102%	Tidak Efisien
Kab. Cirebon	3.770.700.000.000	3.694.210.000.000	98%	Kurang Efisien
Kab. Garut	4.496.840.000.000	4.573.910.000.000	102%	Tidak Efisien
Kab. Indramayu	3.313.120.000.000	3.312.200.000.000	100%	Tidak Efisien
Kab. Karawang	4.374.270.000.000	4.169.180.000.000	95%	Kurang Efisien
Kab. Kuningan	2.776.500.000.000	2.795.800.000.000	101%	Tidak Efisien
Kab. Majalengka	3.239.510.000.000	3.225.170.000.000	100%	Tidak Efisien
Kab. Pangandaran	1.572.140.000.000	1.565.840.000.000	100%	Tidak Efisien
Kab. Purwakarta	2.197.600.000.000	2.184.780.000.000	99%	Kurang Efisien
Kab. Subang	2.994.000.000.000	2.906.510.000.000	97%	Kurang Efisien
Kab. Sukabumi	3.927.300.000.000	4.027.840.000.000	103%	Tidak Efisien
Kab. Sumedang	2.904.390.000.000	2.868.270.000.000	99%	Kurang Efisien
Kab. Tasikmalaya	3.593.230.000.000	3.687.570.000.000	103%	Tidak Efisien
Kota Bandung	5.643.960.000.000	5.407.130.000.000	96%	Kurang Efisien
Kota Banjar	778.990.000.000	745.840.000.000	96%	Kurang Efisien
Kota Bekasi	5.092.170.000.000	4.787.480.000.000	94%	Kurang Efisien
Kota Bogor	2.428.580.000.000	2.354.870.000.000	97%	Kurang Efisien
Kota Cimahi	1.458.000.000.000	1.282.320.000.000	88%	Cukup Efisien
Kota Cirebon	1.633.920.000.000	1.582.880.000.000	97%	Kurang Efisien
Kota Depok	3.059.780.000.000	3.199.200.000.000	105%	Tidak Efisien
Kota Sukabumi	1.193.520.000.000	1.202.030.000.000	101%	Tidak Efisien
Kota Tasikmalaya	1.760.910.000.000	1.743.160.000.000	99%	Kurang Efisien
<b>TAHUN 2021</b>				
Kab. Bandung Barat	2.804.250.000.000	2.917.750.000.000	104%	Tidak Efisien
Kab. Bandung	5.752.870.000.000	5.498.610.000.000	96%	Kurang Efisien
Kab. Bekasi	6.015.710.000.000	6.192.200.000.000	103%	Tidak Efisien
Kab. Bogor	9.124.620.000.000	8.708.390.000.000	95%	Kurang Efisien
Kab. Ciamis	2.673.330.000.000	2.706.100.000.000	101%	Tidak Efisien
Kab. Cianjur	4.055.700.000.000	3.901.610.000.000	96%	Kurang Efisien
Kab. Cirebon	3.955.690.000.000	3.942.810.000.000	100%	Tidak Efisien
Kab. Garut	4.684.400.000.000	4.649.600.000.000	99%	Kurang Efisien
Kab. Indramayu	3.362.950.000.000	3.257.420.000.000	97%	Kurang Efisien
Kab. Karawang	4.951.680.000.000	4.670.670.000.000	94%	Kurang Efisien

Kab. Kuningan	2.778.620.000.000	2.742.150.000.000	99%	Kurang Efisien
Kab. Majalengka	3.070.480.000.000	3.105.900.000.000	101%	Tidak Efisien
Kab. Pangandaran	1.332.350.000.000	1.349.230.000.000	101%	Tidak Efisien
Kab. Purwakarta	2.402.820.000.000	2.397.790.000.000	100%	Tidak Efisien
Kab. Subang	3.151.090.000.000	3.120.310.000.000	99%	Kurang Efisien
Kab. Sukabumi	4.184.600.000.000	4.059.030.000.000	97%	Kurang Efisien
Kab. Sumedang	2.835.870.000.000	2.712.130.000.000	96%	Kurang Efisien
Kab. Tasikmalaya	3.241.570.000.000	3.163.520.000.000	98%	Kurang Efisien
Kota Bandung	5.838.240.000.000	5.675.600.000.000	97%	Kurang Efisien
Kota Banjar	749.070.000.000	754.620.000.000	101%	Tidak Efisien
Kota Bekasi	5.767.650.000.000	5.704.890.000.000	99%	Kurang Efisien
Kota Bogor	2.644.780.000.000	2.637.730.000.000	100%	Tidak Efisien
Kota Cimahi	1.520.140.000.000	1.481.510.000.000	97%	Kurang Efisien
Kota Cirebon	1.346.960.000.000	1.334.560.000.000	99%	Kurang Efisien
Kota Depok	3.396.020.000.000	3.267.620.000.000	96%	Kurang Efisien
Kota Sukabumi	1.244.100.000.000	1.201.050.000.000	97%	Kurang Efisien
Kota Tasikmalaya	2.031.400.000.000	2.013.490.000.000	99%	Kurang Efisien
<b>Rata - Rata</b>			<b>99%</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 3 Kategori yakni tidak efisien, kurang efisien, dan cukup efisien. Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2020 kategori tidak efisien 51,85% , kategori kurang efisien memiliki persentase sebesar 44,45%%, dan kategori cukup efisien memiliki persentase sebesar 3,7%. Sedangkan pada tahun 2021 kategori tidak efisien 33,34% , kategori kurang efisien memiliki persentase sebesar 66,66%%, dan kategori cukup efisien tidak memiliki persentase Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Efisiensi disimpulkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Jawa Barat kurang efisien dan tidak efisien dalam merealisasikan anggaran belanja.

## PEMBAHASAN

### a) Tingkat Efektivitas APBD

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, menyatakan bahwa nilai efektivitas rata – rata APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebesar 106%, maka dapat diartikan bahwa tingkat efektivitas rata – rata APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mencapai kriteria sangat efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima, artinya pagu anggaran APBD Pemerintah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2021 bersifat efektif terhadap realisasi anggarannya.

Dalam teori menyatakan bahwa semakin tinggi nilai efektifitas APBD, maka semakin baik pula kriteria efektivitas APBD yang akan di

dapat. Sehingga arah hubungan yang timbul antara Pagu Anggaran terhadap Realisasi Anggaran adalah positif.

Hasil penelitian ini mempunyai hubungan yang searah dengan teori tersebut. Hasil analisis menyuguhkan gambaran yang sangat positif mengenai tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka ini, dapat disoroti bahwa APBD telah berhasil mencapai kriteria efektivitas dengan memperlihatkan keseimbangan yang baik antara perencanaan dan implementasi. Pengalokasian dana yang cermat dan tepat sasaran sesuai dengan rencana pembangunan daerah memberikan indikasi kuat bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak positif terhadap tujuan pembangunan jangka panjang. Transparansi yang tinggi dalam penyajian informasi keuangan memperkuat kepercayaan masyarakat, sementara akuntabilitas yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan APBD memastikan setiap rupiah digunakan dengan tepat.

Selain itu, analisis juga mencerminkan bahwa APBD mencapai tingkat efektivitas yang optimal melalui manajemen risiko yang cerdas. Identifikasi potensi risiko keuangan dan strategi mitigasinya menggambarkan pendekatan proaktif pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi dan perubahan kondisi. Pemantauan dan evaluasi berkala menegaskan keterlibatan yang berkelanjutan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berkontribusi maksimal terhadap pembangunan. Keberhasilan ini menandakan bahwa APBD tidak hanya mendukung pencapaian tujuan

pembangunan daerah secara optimal, tetapi juga menggambarkan manajemen keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

#### b) Tingkat Efisiensi APBD

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis, menyatakan bahwa nilai efisiensi rata – rata APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebesar 99%, maka dapat diartikan bahwa tingkat efektivitas rata – rata APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mencapai kriteria kurang efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima, artinya pagu anggaran APBD Pemerintah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2021 bersifat tidak efisien terhadap realisasi anggarannya.

Dalam teori menyatakan bahwa semakin tinggi nilai efisiensi APBD, maka semakin tidak baik pula kriteria efisiensi APBD yang akan di dapat. Sehingga arah hubungan yang timbul antara Pagu Anggaran terhadap Realisasi Anggaran adalah negatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang optimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengalokasikan dana sesuai dengan rencana pembangunan, namun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. Pemantauan dan evaluasi berkala kurang terstruktur, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi kinerja proyek dan membuat penyesuaian yang diperlukan sepanjang tahun anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan belum mencapai tingkat yang diharapkan, mengakibatkan kurangnya dukungan dan legitimasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Adanya kekurangan dalam manajemen risiko juga terlihat, di mana tidak semua potensi risiko keuangan telah diidentifikasi dan diatasi secara efisien. Pengelolaan utang yang kurang berkelanjutan juga menjadi perhatian, dengan adanya kecenderungan penggunaan utang untuk tujuan yang mungkin tidak memberikan dampak positif yang diharapkan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, kurangnya pengendalian yang cermat terhadap pengeluaran dan penerimaan berpotensi mengakibatkan ketidakseimbangan dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek tersebut sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi APBD di masa mendatang.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat efektivitas rata – rata Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi yakni pada tahun 2020 – 2021 dikatakan sangat efektif karena memiliki persentase sebesar 106 %.
- 2) Tingkat efisiensi rata – rata Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi yakni pada tahun 2020 – 2021 dikatakan kurang efisien karena memiliki persentase sebesar 99 %.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa temuan penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran, sehingga penulis memebrikan saran yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi memperbaikinya, yaitu :

- 1) Perencanaan yang Baik:
- 2) Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas:
- 3) Penyusunan APBD yang Realistis:
- 4) Kolaborasi dan Konsultasi dengan
- 5) Pelaksanaan Proyek dan Program yang Efisien:
- 6) Transparansi Informasi:
- 7) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:
- 8) Pencegahan Korupsi dan Penyimpangan:
- 9) Evaluasi dan Pembelajaran:
- 10) Partisipasi Masyarakat:

Dengan menerapkan saran-saran ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi realisasi APBD serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, D., & Maesaroh, M. (2021). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM SILAMPAH (SISTEM LAPOR SAMPAH). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 272–285.
- Asmaniar, A. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin.
- Basri, R. (2013). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).

- Catio, M. (2020). Manajemen sumber daya manusia. *Asep Rachatullah. Indigo Media. Tangerang.*
- Faddila, S., Argenti, G., & Gumilar, G. G. (2022). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 2455–2460.
- Firdausi, Z. N. (2022). PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISI SURAKARTA. *Hijri*, 11(1), 51–60.
- Hayati, P. N. (2022). *IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG*. Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama.
- Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 770–781.
- Murti, E. (2017). Pengaruh pembagian kerja terhadap efektifitas organisasi publik di desa karangrejo kecamatan kendal kabupaten ngawi. *Jurnal Sosial*, 16(1).
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). *Manajemen pendidikan*. RajaGrafiKa Persada.
- Nailufarh, Q. A. (2010). Kesejahteraan Ekonomi rakyat; di antara Harapan dan realitas. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 7(01).
- Purpitasari, P., & Kurnia, K. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(11).
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Saputra, R. W. (2018). *Analisis Kontribusi Sektor Pertanian dan Pariwisata Kabupaten Tanggamus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung (2010-2015) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis faktor penyebab dan akibat dari ketidaktepatan waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1).
- Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).
- Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Masduki, M., & Abdussalam, A. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Intrans Publishing.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128–152.
- TRIA, D. (2018). *EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT (Studi di BAZNAS Kabupaten Serang*. Universitas Islam Negeri" SMH" Banten.
- Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah*, 1(1), 342–351.
- Wance, M. (2019). Dinamika perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) buru selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1).
- Yuliaslati, Y. (2017). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Katalogis*, 4(12).
- Yuliyanto, W., Uswatun Khasanah, & Riza Umami. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>